

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENADAHAN MOTOR HASIL PENCURIAN
ANTAR PROVINSI
(Studi Putusan Nomor: 857/PID.B/2023/PN TJK)

Oleh
EGY ANUGRAH SAGALA
NPM. 2112011035

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika yang menjadi objek akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan khususnya Pasal 380 KUHP tentang Penadah, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data Deskriptif kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian 1) menunjukkan bahwa terdakwa mampu sebagai seorang yang dikategorikan dalam pertanggungjawaban Pidana dengan mempertimbangkan yang patut diduga telah mengetahui barang tersebut tidak memiliki dokumen namun tetap melakukan pengantaran dengan nominal imbalan yang diterima. Terdakwa pun telah secara menjadi kebiasaan melakukan tindak pidana penadah 2 kali dengan tujuan yang sama, dan perencanaan dengan menutupi kendaraan bermotor tersebut dengan kasur busa agar tidak diketahui petugas. Oleh karena pertimbangan secara yuridis (perbuatan melawan hukum telah terpenuhi), pertimbangan sosiologis (terdakwa mengakui kesalahan, berlaku sopan, dan belum pernah ditahan) serta pertimbangan filosofis (memberikan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan terdakwa menerima vonis pidana penjara 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan 2) kesesuaian putusan dengan nilai keadilan yang memberikan sanksi dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pelaku, tujuannya adalah untuk memberikan

Egy Anugrah Sagala

efek jera baginya karena untuk menghindari menjadi kebiasaan dalam tindak pidana penadahan tersebut. Pelaku tindak pidana penadahan tersebut telah pula mampu bertanggungjawab sebagaimana penjelasan mengenai unsur kesalahan dan tidak adanya alasan penghapusan pidana baginya, sehingga dengan putusan tersebut memberikan dan menciptakan rasa aman di masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan untuk kesekian kalinya.

Saran hasil penelitian ini 1) Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selalu berintegritas dalam menegakan hukum, penjatuhan putusan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan digunakan untuk memberikan rasa adil bagi siapapun tanpa memandang bulu. Dengan tidak memihak ataupun memikirkan kerugian pada korban agar diadili dengan tepat guna tujuan hukum memberikan efek jera dan memastikank keamanan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 2) Kepada Masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima tawaran dari orang terdekat ataupun orang asing. Kita tidak mengetahui apakah asal usul barang tersebut milik atau kepunyaannya, barang hasil kejahatan terutama pada kendaraan bermotor memiliki bentuk kepemilikan beragam, mulai dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kenadaraan Bermotor (BPKB) dengan nama asli dan jika tidak adanya bukti kepemilikan tersebut harap untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Kata Kunci : Penadahan, Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan

ABSTRACT
CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATORS OF THEFT OF
MOTORCYCLES
INTER-PROVINCE
(Study Decision Number: 857/PID. B/2023/PN TJK)

By
EGY ANUGRAH SAGALA
NPM. 2112011035

Criminal liability is a form of mechanism created to react to the violation of a certain act that has been agreed. The party who carries out the sale and purchase contract is also threatened with criminal penalties if the object will be proven to be the result of a crime. Thieves can also be said to be as bad as thieves, but in this case thieves are a stand-alone crime. Proving this is indeed difficult, but in practice it can usually be seen from the circumstances or way the item was purchased, for example, it was bought at a very low price, bought at night in hiding which according to the size of the place was indeed suspicious, the transaction was not carried out with proper procedures.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data used is secondary data, the data collection method in this study is a literature study, especially Article 380 of the Criminal Code concerning Procurement, and the data analysis used is qualitative descriptive data analysis. The resource persons in this study consisted of Judges at the Tanjung Karang District Court, and academics from the criminal law section of the Faculty of Law, University of Lampung

The results of the study 1) show that the defendant is capable as a person categorized in criminal liability by considering that it is reasonable to suspect that the goods do not have documents but still deliver them with the nominal amount of the reward received. The defendant has also become a habit of committing the crime of theft 2 times with the same purpose, and the plan is to cover the motor vehicle with a foam mattress so that the officer does not know it. Because of juridical considerations (unlawful acts have been fulfilled), sociological considerations (the defendant admitted his guilt, behaved politely, and has never been detained) and philosophical considerations (providing and creating a sense of security for the community and the defendant received a prison sentence of 1 (One) year and 3 (three) months The conformity of the verdict with the value of justice that provides sanctions by considering the circumstances of the perpetrator, the purpose is to provide a deterrent effect for him because it is to avoid becoming a habit in the crime of arrest. The perpetrator of the crime of theft has also been able to take responsibility as explained by the explanation of the elements of the offen

Egy Anugrah Sagala

and there is no reason for the abolition of the crime for him, so that the decision provides and creates a sense of security in the community to prevent the occurrence of the crime of arrest for the umpteenth time.

Suggestions from the results of this study 1) To Law Enforcement Officers (APH) to always have integrity in upholding the law, the imposition of criminal verdicts in criminal cases of detention is used to provide a sense of justice for anyone regardless of feathers. By not taking sides or thinking about the losses to the victim so that they are tried appropriately for legal purposes, providing a deterrent effect and ensuring security for the community in daily life 2) To the community to be more selective in accepting offers from the closest people or strangers. We do not know whether the origin of the goods belongs or belongs, the goods resulting from crime, especially in motor vehicles, have various forms of ownership, ranging from Vehicle Number Registration Letters (STNK), Proof of Motor Vehicle Owners (BPKB) with real names and if there is no proof of ownership, please report to the authorities.

Keywords: Prosecution, Criminal Liability, Justice